

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHETA

Triwulan II 2022



BPK Kalteng Serahkan LHP atas Bantuan Partai Politik TA 2021

BPK Kalteng Selenggarakan Konsinyering Penyusunan LHP

14 Pemda di Wilayah Kalteng Memperoleh Opini WTP

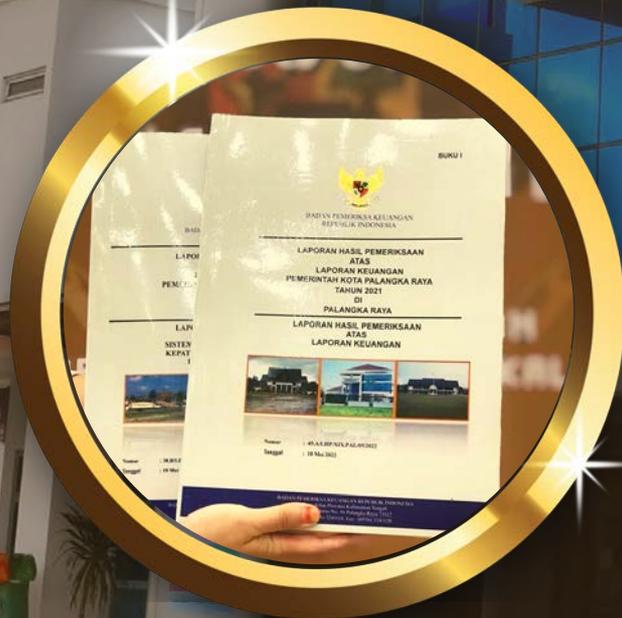
Tanggung, Layanan Prima!

BPK PERWAKILAN PROV. KALTENG

Pemprov Kalteng Kembali Mendapatkan Opini WTP

BPK Kalteng Go Show dengan Stasiun TV Lokal

Sinergi BPK Kalteng dan Inspektorat se-Kalteng Melalui Pemantauan TLRHP



Ikuti Info Terbaru & Media Sosial BPK Kalteng disini



CENTER FOR FORESIGHT

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

foresight.bpk.go.id

BPK Kalteng Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2021 pada 147 partai politik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan dilaksanakan pada bulan Maret 2022 setelah tim pemeriksa BPK melakukan pemeriksaan interim atas LKPD TA 2021 pada masing-masing Pemda. Pada bulan April 2022, BPK Kalteng menyerahkan LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2021 kepada pengurus partai politik penerima bantuan.

Kegiatan ini diselenggarakan di 15 daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. LHP diterima oleh ketua partai penerima bantuan atau yang mewakili. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa dana Banparpol TA 2021 yang telah ditransfer dan diterima oleh partai politik sebesar Rp16.534.930.638,00 dan telah dipertanggungjawabkan oleh partai politik sebesar Rp16.595.339.557,00. LPJ Banparpol yang lebih besar dari nilai bantuan diantaranya dikarenakan terdapat partai politik dalam menyusun LPJ Banparpol tidak hanya yang bersumber dari APBD melainkan juga termasuk dana yang bersumber dari internal partai politik atau sumber lainnya yang sah.

Adapun kesimpulan atas pemeriksaan LPJ Banparpol TA 2021 yaitu sesuai sebanyak 119 LPJ partai politik (80,96%) dan sesuai dengan pengecualian, sebanyak 28 LPJ partai politik (19,04%).



No	Entitas	Sesuai	Sesuai dengan Pengecualian	Total	% Sesuai
1	Kab. Katingan	10	0	10	100,00%
2	Kab. Kotawaringin Timur	10	0	10	100,00%
3	Kab. Kotawaringin Barat	10	0	10	100,00%
4	Kab. Seruyan	10	0	10	100,00%
5	Kab. Pulang Pisau	8	0	8	100,00%
6	Provinsi Kalimantan Tengah	10	1	11	90,91%
7	Kota Palangka Raya	9	1	10	90,00%
8	Kab. Barito Utara	9	1	10	90,00%
9	Kab. Barito Selatan	8	1	9	88,89%
10	Kab. Barito Timur	8	2	10	80,00%
11	Kab. Gunung Mas	6	3	9	66,67%
12	Kab. Kapuas	7	4	11	63,64%
13	Kab. Murung Raya	5	4	9	55,56%
14	Kab. Sukamara	5	5	10	50,00%
15	Kab. Lamandau	4	6	10	40,00%



JAGA KUALITAS LAPORAN, BPK KALTENG SELENGGARAKAN KONSINYERING PENYUSUNAN LHP ATAS LKPD DAN LPAR TAHUN 2021

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan konsinyering penyusunan LHP atas LKPD dan LPAR Tahun 2021.

Kegiatan berlangsung selama lima hari mulai tanggal 23 s.d 27 April 2022 di Kantor BPK Kalteng dan diikuti oleh 16 tim pemeriksa yang terdiri dari 15 tim pemeriksaan LKPD dan satu tim pemeriksaan LPAR.



Acara dibuka oleh Kepala Perwakilan, Agus Priyono dengan didampingi oleh Kepala Subauditorat Kalteng I, Tukino dan Kepala Subauditorat Kalteng II, Mochammad Suharyanto.



Beberapa agenda penting dalam kegiatan konsinyering ini adalah tim pemeriksa menyusun simpulan hasil pemeriksaan dan merumuskan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan kualitas penyajian laporan keuangan maupun kinerja pengelolaan keuangan daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Tim Perencana dan Pengkaji Pemeriksaan (TP3) yang bertugas diantaranya untuk melakukan kajian atas pengaruh temuan pemeriksaan dalam laporan SPI dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terhadap opini. Dengan diselenggarakannya konsinyering ini, diharapkan laporan yang dihasilkan berkualitas dan akan memberikan manfaat bagi perbaikan pengelolaan keuangan daerah.



14 PEMDA DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH MEMPEROLEH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN ATAS LKPD TAHUN 2021



Jumat, 13 Mei 2022 Kalan BPK Kalteng, Agus Priyono menyerahkan LHP atas LKPD TA 2021 untuk 14 Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Kepala Daerah masing – masing Pemerintah Daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, Kepala BPKAD beserta jajarannya. Sedangkan Kalan didampingi oleh Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah yang menerima LHP atas LKPD Tahun 2021 adalah Pemerintah Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, dan Kabupaten Pulang Pisau.



LHP atas LKPD Tahun 2021 terdiri dari dua laporan utama yaitu LHP atas LKPD Tahun 2021 dan LHP atas SPI dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan ini diawali dengan lagu pembuka Ibu Pertiwi oleh vokal grup BPK Kalteng dan dilanjutkan lagu Indonesia Raya dan doa. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan BAST dan penyerahan LHP.



Dalam sambutannya, Kalan menyampaikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri 1443 H kepada para undangan yang hadir dikarenakan kegiatan berlangsung masih dalam bulan Syawal dan menyampaikan apresiasi atas usaha-usaha perbaikan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas Pengelolaan Keuangan Daerah TA 2021.

Namun demikian, tanpa mengesampingkan keberhasilan yang telah dicapai, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang masih banyak terjadi dan hendaknya menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah, diantaranya yaitu terkait pengelolaan PAD, kas, dan aset tetap yang belum sepenuhnya memadai. BPK mengharapkan Pemerintah Daerah untuk secepatnya menindaklanjuti beberapa temuan, khususnya yang terkait dengan pengelolaan dan pencatatan aset tetap, baik temuan-temuan sebelumnya maupun temuan-temuan pada TA 2021. Jika tidak segera ditindaklanjuti, hal tersebut sangat berpotensi mempengaruhi opini dimasa mendatang, mengingat akumulasi nilainya akan melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” kepada 14 Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah atas LKPD Tahun 2021.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEMBALI MENDAPATKAN OPINI WTP DARI BPK



Rabu, 18 Mei 2022 bertempat di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam kegiatan rapat paripurna ke-8 masa persidangan I Tahun 2022, BPK menyerahkan LHP atas LKPD dan Kinerja atas Penanggulangan Kemiskinan di Daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021. LHP diserahkan oleh Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VI, Dori Santosa dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Wiyatno dan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Dalam penyerahan tersebut, Tortama Keuangan Negara VI didampingi oleh Kepala Perwakilan, Agus Priyono beserta pejabat struktural dan tim pemeriksa dan tamu undangan lainnya.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, disimpulkan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Untuk itu, BPK memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.

Tanpa mengurangi keberhasilan dalam pencapaian pelaksanaan anggaran Tahun 2021, BPK menemukan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang tertuang dalam LHP dan hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Sedangkan hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, maka dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Hasil Pemeriksaan ini akan lebih bernilai apabila diikuti dengan tindak lanjut sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPK. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Pada kesempatan tersebut, BPK juga menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021.



Kamis, 9 Juni 2022, Kalan BPK Kalteng menjadi narasumber lokal Dayak TV dalam dialog interaktif dengan tema “Mengupas Opini BPK” yang dipandu oleh Bos Try (Presenter Dayak TV). Acara ini dimaksud untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat tentang dan bagaimana opini yang diberikan BPK.

Acara diawali dengan pengenalan profil Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, dilanjutkan dengan wawancara mengenai apakah opini BPK menunjukkan bahwa pemda bersih dari Korupsi, apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat setelah pemda memperoleh opini WTP, dan apakah BPK sendiri pernah diaudit.

Kemudian, Kepala Perwakilan menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat, seperti, mengapa hasil pemeriksaan keuangan negara oleh BPK diserahkan kepada DPRD, bagaimana tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPRD dan peran BPK Kalteng dalam pengelolaan keuangan negara. Acara diakhiri dengan penutup oleh Kepala Perwakilan.

Kepala Perwakilan menyampaikan harapan kepada Pemda untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah karena opini WTP tidak statis sehingga bisa mempertahankan opini.

BPK KALTENG GO SHOW DENGAN STASIUN TV LOKAL

9 Juni 2022





BUKA PUASA BERSAMA



Gallery
BPK KALTENG

FESTIVAL BUDAYA "ISEN MULANG"



PENGHARGAAN IKPA



PENGARAHAN KALAN KEPADA CPNS



MALAM KEPRIHATINAN BNN



SEPEDAAN DAN SENAM "JUMAT"

Sinergi BPK Kalteng dan Inspektorat Melalui Pemantauan TLRHP Semester I Tahun 2022

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2022 pada tanggal 22 – 24 Juni 2022. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dihadiri oleh Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah beserta jajarannya. Acara dibuka oleh Kepala Subauditorat Kalteng I, Tukino yang mewakili Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng. Dalam pembukaan kegiatan, Tukino menyampaikan harapan agar Pemerintah Daerah secara aktif meningkatkan penyampaian tindak lanjut, mengingat pada Semester I 2022 telah ada penambahan rekomendasi dari hasil pemeriksaan laporan keuangan Tahun 2021.

Kegiatan berlangsung dengan agenda pembahasan tindak lanjut menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SiPTL) selama tiga hari oleh masing-masing entitas (pemerintah daerah) dengan tim pembahas BPK sesuai penugasan dari Kepala Perwakilan.

Kegiatan ditutup oleh Kepala Perwakilan, Agus Priyono. Agus Priyono menyampaikan hasil sementara pemantauan TLRHP Semester I 2022 dan mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah mengupayakan penyelesaian TLRHP. Untuk kedepannya, dalam rangka percepatan penyelesaian TLRHP, BPK Kalteng akan mengintensifkan kegiatan Forum Mediasi SIMPATIK.

